

BAB IV

KEPENTINGAN TURKI MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI DOHA QATAR

Timur Tengah memiliki penyangga strategis untuk membentuk, mendominasi dan mengubah keseimbangan pasar energi global. Kekayaan itu pula yang menyebabkan Timur Tengah menjadi kawasan yang paling bergejolak di dunia hingga saat ini. Konflik bersenjata, perang saudara, kudeta, ambisi nuklir dan banyak faktor lain tidak luput hadir dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Kehadiran pertama militer Turki setelah 100 tahun tidak terlibat secara langsung di Timur Tengah menunjukkan kepentingan strategis Turki di kawasan tersebut

Selama satu dekade, westernisasi lebih menarik bagi Turki untuk dijadikan fokus dalam kebijakan luar negeri. Munculnya kepemimpinan-kepemimpinan baru dari AKP yang terpilih pada tahun 2002 mengganti fokus kebijakan luar negeri Turki. Kebijakan Turki berbelok arah dari yang tadinya terfokus pada modernisasi, westernisasi dan akses ke UE, menjadi lebih menjalin hubungan dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, Turki senantiasa menjalankan kebijakan *zero problems with neighbor*.

Turki berbatasan langsung dengan negara yang bergejolak di Timur Tengah, yaitu Suriah dan Irak. Lingkungan yang kaya akan ancaman memiliki dampak untuk Turki apabila tidak memiliki postur militer yang kuat dan efektif. Kemudian, dengan kehadiran Turki di Timur Tengah, kestabilan di kawasan ini secara otomatis menjadi perhatian Turki. Ketidakstabilan kawasan ini memiliki konsekuensi yang besar pada negara-negara yang terlibat di dalamnya dan pada akhirnya bisa mengancam kepentingan Turki.

Turki tidak akan serta merta memilih rekan dan lokasi untuk mendirikan sebuah pangkalan militer. Terlebih lagi, ini adalah penempatan militer di luar negeri yang terbesar kedua bagi Turki. Dibutuhkan pertimbangan untuk merumuskan

perjanjian yang menghasilkan pembangunan pangkalan militer di Doha. Dalam hal ini, kerangka berpikir William D. Coplin mengenai teori pembuatan kebijakan luar negeri digunakan sebagai acuan. Kerangka pemikiran digunakan untuk menganalisis faktor yang menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Turki menghasilkan keputusan menjalin hubungan erat dengan Qatar dan membangun pangkalan militer di Doha Qatar. Faktor-faktor dalam teori pembuatan kebijakan luar negeri Coplin yang menjadi pertimbangan Turki dalam keputusannya adalah kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer negara serta konteks internasional. Alasan Turki membangun pangkalan militer di Doha Qatar adalah bentuk dari maneuver AKP dan khususnya Erdogan dalam politik dalam dan luar negeri Turki. Kemudian, kemampuan militer Turki yang mumpuni juga dimanfaatkan menjadi peluang memperluas pengaruh Turki di Timur Tengah. Setelah itu, stabilitas di Timur Tengah dan kesamaan sikap Turki dan Qatar dalam masalah-masalah di kawasan juga menjadi alasan pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar. Kerjasama bilateral Turki dan Qatar yang semakin erat sampai pada titik dimana Turki menyatakan bahwa keamanan dan stabilitas di Qatar sama dengan keamanan dan stabilitas di Turki.¹

Keputusan tersebut juga tentunya dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan nasional yang ingin diraih, baik oleh Turki maupun Qatar. Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa salah satu kategori kepentingan nasional adalah keamanan militer (*military security*). Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa instalasi militer pertama Turki di Timur Tengah ini adalah dalam rangka "kehadiran untuk stabilitas".²

¹ Heather Murdock, *Turkey Opens First Mideast Military Base in Qatar*, VOA News, 10 Mei 2016, diakses dari <https://www.voanews.com/a/turkey-opens-first-middle-east-military-base-in-qatar/3323653.html> pada 14 September 2018

² Reuters, *Seeing shared threats, Turkey sets up military base in Qatar*, 29 April 2016, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-qatar-turkey-military/seeing-shared-threats-turkey-sets-up-military-base-in-qatar-idUSKCN0XP2IT> pada 14 Februari 2018

Pembangunan pangkalan militer dan penempatan tentara Turki di Qatar diharapkan menghasilkan dampak baik dalam rangka keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, khususnya untuk kepentingan Turki dan Qatar. Apabila Turki dapat hadir dan ikut berperan menjaga stabilitas di kawasan, hal tersebut dapat meningkatkan pengaruh Turki di Timur Tengah. Cara Turki mewujudkan kepentingan keamanan militer tersebut adalah dengan membangun pangkalan militer di Doha Qatar.

A. Manuver AKP sebagai Partai yang Berkuasa dalam Politik Luar Negeri Turki

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah menjadi partai dominan Turki sejak pemilihan pertama yang mereka ikuti pada tahun 2002. AKP dengan mantap meningkatkan perolehan suara dari 35 persen pada 2002 menjadi 46,58 persen pada 2007 dan 49,91 persen pada 2011.³ Tiga tokoh besar AKP, yaitu Erdogan, Abdullah Gul dan Davutoglu menduduki posisi penting pemerintahan. Erdogan menjadi perdana menteri, Abdullah Gul menjadi presiden dan Davutoglu menjadi menteri luar negeri. Hal tersebut mempunyai andil besar bagi AKP untuk melakukan manuver dalam politik luar negeri Turki.

AKP memenangkan pemilu untuk kedua kalinya dengan perolehan suara 46,58 persen pada pemilu tahun 2007. Dengan kemenangan tersebut, AKP menduduki 341 kursi di parlemen. Pada pemilu tahun 2011 perolehan suara AKP meningkat menjadi 49,91 persen sehingga dapat menempatkan 327 perwakilannya di parlemen. 60 persen hingga 70 persen kursi legislatif yang dikuasai AKP sejak tahun 2002 menjadikan partai tersebut sebagai aktor dominan pembuatan kebijakan luar negeri Turki. Bahkan, pada pemilihan umum presiden secara langsung

³ Menderes Çınar, *The Power Strategies of the AKP in Turkey*, The AKP and Turkish Foreign Policy in The Middle East Collected Paper, Vol. 5, April 2016, hlm. 12

yang pertama di Turki pada Agustus 2014—saat Erdogan terpilih menjadi presiden, Erdogan menyatakan rencananya untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada presiden. Hal tersebut diharapkan agar presiden dapat berperan lebih banyak dalam politik domestik maupun internasional.⁴

Pada 16 April 2017, Erdogan benar-benar menjadi orang nomor satu di Turki melalui referendum konstitusi. Referendum tersebut mengamankan perubahan sistem pemerintahan di Turki dari parlementer ke presidensial. Kemudian, Erdogan berpeluang untuk berkuasa sampai dengan tahun 2029.⁵

Episode baru dalam dinamika politik luar negeri Turki dimulai pasca kemenangan-kemenangan AKP dan tokohnya dalam pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari politik luar negeri Turki yang mengalami berbagai perubahan dalam konteks. Di awal kekuasaannya, Turki memang menjadikan keanggotaan UE sebagai fokus utama politik luar negerinya. Namun, sejak tahun 2005 Turki mulai memperluas pengaruh politik luar negerinya ke kawasan tetangganya, yaitu Timur Tengah. Turki menempatkan diri sebagai pusat bagi tetangga-tetangganya dengan prinsip *zero problems with neighbor*.

AKP sendiri melahirkan berbagai inovasi dalam politik luar negeri Turki, khususnya dalam fokusnya di Timur Tengah. Beberapa kebijakan luar negeri AKP di Timur Tengah dinilai menantang tradisi politik luar negeri Turki yang telah lama terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan AKP, seperti:

⁴ Arina Fikriya, Skripsi “Peran AKP dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Turki di Timur Tengah”, Skripsi S1, UMY, 2014, hlm. 78 – 79

⁵ Taufiq Nur Shiddiq, *Referendum Turki, Erdogan, dan Para Diaspora*, Tirto, 30 April 2017, diakses dari <https://tirto.id/referendum-turki-erdogan-dan-para-diaspora-cnJ5> pada 21 April 2018

- 1) Turki menolak permintaan AS untuk mengirimkan tentara AS melalui Turki dalam invasi Irak tahun 2003.
- 2) Rezim pertama yang mengundang langsung pemimpin Hamas Palestina ke Ankara pada tahun 2006 adalah pemerintahan AKP. Undangannya tersebut dalam rangka membahas konflik Israel-Palestina yang menghasilkan persebatan mengenai masa depan hubungan Turki-Israel.
- 3) Turki menjadi Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 2004 dan mendapat status sebagai pengamat di Liga Arab.
- 4) Kerjasama politik dan ekonomi menjadikan hubungan Turki dan Suriah kian membaik dan meningkat. Rezim pertama yang melakukan normalisasi hubungan dengan Suriah adalah pemerintahan AKP saat Erdogan menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2004. Kemudian, Turki memediasi pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel pada tahun 2008, Suriah dan Irak pada tahun 2009 serta menandatangani kerjasama dan latihan militer bersama Suriah pada April 2009.
- 5) Kerjasama ekonomi Turki dan Qatar yang meningkat dan diperluas hingga ke isu energi, politik luar negeri, keamanan dan upaya terlibat aktif dalam masalah-masalah di kawasan.
- 6) Peningkatan hubungan dengan Arab Saudi ditandai dengan kunjungan Raja Abdullah pada tahun 2006. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 40 tahun. Kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh presiden Gul pada tahun 2009 dan menteri luar negeri Davutoglu pada tahun 2010.⁶

⁶ Arlan Hardiyan, Skripsi “*Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki di Era Kepemimpinan Adelet Ve Kalkınma Partisi (AKP)*”, Skripsi S1, UI, 2014, hlm. 8 – 9

B. Kekuatan Militer Turki yang Mumpuni Sehingga dapat Memperluas Pengaruh ke Timur Tengah

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri menurut Coplin adalah kemampuan ekonomi dan militer suatu negara. Jika dilihat dari sisi kekuatan militer, Turki merupakan salah satu negara yang kuat dalam hal militer di dunia. Turki berada di peringkat ke-delapan dalam daftar 10 teratas kekuatan militer global, menurut situs web Global Firepower. Peringkat 113 negara yang diterbitkan di Global Firepower bergantung pada lebih dari 50 faktor yang berbeda, termasuk total senjata api, posisi geografis, dan sumber daya alam, untuk menentukan skor “PowerIndex” [PwrIndx].

Menurut Peringkat Kekuatan Militer 2017 dengan 113 negara dalam database-nya, Turki menduduki peringkat kedelapan dengan peringkat PwrIndx 0,2491, tepat di atas Jerman, yang memiliki PwrIndx 0,2609 dan Mesir dengan PwrIndx sebesar 0,2676. Peringkat ini menunjukkan bahwa Turki memiliki total 41,6 juta tenaga kerja yang tersedia, 35 juta orang cocok untuk layanan, dan 1,3 juta orang berada di usia produktif militer.

Turki memiliki total 743.415 personel militer di dalam angkatan bersenjata, dengan 382.850 yang aktif dan 360.565 lainnya sebagai staf cadangan. Turki juga memiliki total pesawat 1.018, dengan 207 pesawat tempur dan 207 pesawat serangan; 194 aset angkatan laut dengan 16 frigat, sembilan korvet dan 12 kapal selam; 2.445 tank tempur, 7.550 kendaraan tempur lapis baja, 1.013 artileri *self-propelled*, 697 artileri ditarik dan 811 proyektor roket. Anggaran pertahanan Turki adalah 8,2

miliar dolar AS dan Turki memiliki total tenaga kerja sampai 30,2 juta jiwa.⁷

Berikut adalah peringkat 10 besar kekuatan militer dunia tahun 2017 menurut Global Firepower:

Tabel 4.1 Peringkat Sepuluh Besar Kekuatan Militer Dunia Menurut Global Firepower (Diolah oleh: Marilda Azka Azzahra)

Peringkat	Nama Negara	PowerIndex
1	Amerika Serikat	0,0857
2	Rusia	0,0929
3	Tiongkok	0,0945
4	India	0,1593
5	Perancis	0,1914
6	Inggris	0,2131
7	Jepang	0,2137
8	Turki	0,2491
9	Jerman	0,2609
10	Mesir	0,2676

⁷ Hurriyet Daily News, *Turkish military in 'firepower' world top 10 list*, 1 September 2017, diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-in-firepower-world-top-10-list-117462> pada 21 April 2018

Dengan melihat kekuatan militer Turki ini dan arah kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah, maka Turki berpeluang mewujudkan kepentingan strategis untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Terlebih lagi, Turki yang terjun ke kawasan dapat menjadi pemain yang paling kuat secara militer—di luar aktor-aktor eksternal yang ada di Timur Tengah.

C. Kesamaan Sikap Turki dan Qatar dalam Masalah-masalah Stabilitas di Timur Tengah

Kepentingan Turki terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi fokus utama Turki dalam membangun pangkalan militer di Doha Qatar. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbeloknya arah kebijakan pasca AKP berada di puncak kekuasaan dipengaruhi oleh dua tragedi besar, yaitu serangan 11 September 2001 dan invasi Irak oleh AS pada tahun 2003. UE yang bersikap menghambat akses Turki ke UE juga menjadi salah satu faktor perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Kerangka kebijakan luar negeri Turki menjadi terbuka terhadap kawasan Timur Tengah melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Turki aktif dalam upaya perdamaian Arab-Israel, berupaya mewujudkan perdamaian di Lebanon dan Palestina serta membangun kerjasama dengan beberapa negara di Teluk dalam rangka menghadapi dampak invasi AS di Irak.

Mempererat kemitraan dengan Qatar menjadi pintu untuk Turki untuk memperdalam pengaruhnya di Timur Tengah terutama secara militer, mengingat ini adalah kali pertama setelah 100 tahun. Sebelum perjanjian militer dilakukan sehingga melahirkan kebijakan pembangunan pangkalan militer, Turki telah melakukan berbagai upaya meningkatkan pengaruh di Timur Tengah. Dari keaktifan negaranya dalam *Arab Spring* sampai dengan memilih menggandeng Qatar sebagai mitra strategis dibandingkan

dengan negara GCC lainnya untuk mewujudkan kepentingannya di Timur Tengah.

1. Sepak Terjang Turki di *Arab Spring*

Arab Spring memiliki dampak yang dirasakan hampir seluruh wilayah Timur Tengah pada 18 Desember 2010. Negara-negara pertama yang mendapatkan dampak adalah Tunisia, Mesir, Libya, kemudian disusul Suriah dan Yaman. Protes rakyat terjadi di Irak, Al-Jazair, Yordania, Maroko, Oman Kwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Bahrain. Kerusuhan yang tidak berkesudahan mengenai persoalan perbatasan antara Palestina dan Israel juga menjadi salah satu bahan konflik abadi.⁸

Arab Spring tidak hanya menantang rezim otoriter di wilayah tersebut tetapi juga strategi kebijakan luar negeri Turki. Pergolakan di dunia Arab menciptakan dilema antara etika dan kepentingan pribadi dalam politik luar negeri Turki. Kebijakan luar negeri *zero problems with neighbor* menghadapi dilema etika sebelum terjadinya *Arab Spring*. Sikap kebijakan luar negeri AKP menghadapi kritik dalam konteks dukungan untuk rezim Iran—yang juga merupakan tetangga Turki—yang brutal dan otoriter.⁹

Namun, untuk jangka panjang, *Arab Spring* membuat Turki cenderung mendapat dampak positif di Timur Tengah. Turki lebih mungkin membangun ikatan ekonomi dan budayanya jika negara-negara di kawasan itu dicirikan oleh sistem demokratis yang terbuka, karena Turki telah lama menjalankan demokrasi ditambah demografi penduduk yang sebagian besar Muslim. Pengaruh Turki yang sedikit

⁸ Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta: Maharsa, 2014, hlm. 171

⁹ Ziya Öniş, *Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest*, Insight Turkey, Vol. 14, No. 3, 2012, hlm. 1 – 2

demis sedikit meningkat di Timur Tengah dapat dilihat dari sepak terjang Turki merespon *Arab Spring* khususnya di Mesir, Libya dan Suriah.

Pemerintah AKP dengan kuat mendukung pro-demokratisasi di Mesir, terutama ketika Presiden Mubarak digulingkan dari kekuasaan. Bahkan, sebelum jatuhnya Mubarak, Perdana Menteri Turki Erdogan secara tegas mendesaknya untuk meninggalkan jabatannya. Erdogan melakukan kunjungan yang populer di Kairo. Pada saat itu Erdogan dengan jelas menyatakan dukungannya untuk transformasi politik di Mesir ke arah tatanan politik yang terbuka dan pluralistik, dengan mengacu pada pentingnya pengalaman Turki dalam membangun tatanan politik sekuler. Dalam kasus Libya dan Suriah, dukungan awal untuk pasukan yang menentang rezim otoriter yang ada jauh lebih ambigu dan lemah.

Dalam kasus Libya, pemerintah Turki enggan menampilkan diri sebagai kekuatan aktif untuk perubahan rezim mengingat fakta bahwa Muammar Qaddafi tidak mau mengakui kekalahan dibandingkan mitranya dari Mesir, Hosni Mubarak. Selain itu, kepentingan ekonomi Turki, perdagangan, investasi, dan kehadiran tenaga kerja Turki berada pada skala yang jauh lebih besar di Libya dibandingkan dengan Mesir, jelas membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati. Pada tahap awal, Turki enggan mendukung operasi NATO di Libya. Akibatnya Turki mendapat kritik serius dari pasukan oposisi di Libya dan masyarakat internasional karena terlalu pasif dan lunak terhadap rezim yang ada. Namun, Turki kemudian melakukan perubahan dalam kebijakan terhadap Libya dan mengubah posisinya untuk mendukung operasi NATO. Operasi tersebut menyebabkan runtuhnya rezim Qaddafi, tetapi Turki

tetap menjadi mitra yang enggan dan pasif dalam prosesnya.¹⁰

Kebijakan luar negeri Turki juga menghadapi tantangan serius dalam kasus Suriah. Suriah menjadi penting karena akan disajikan sebagai kisah sukses nyata dari strategi *zero problems with neighbors* Davutoglu. Hubungan dengan Suriah—yang telah buruk sepanjang 1990-an—meningkat secara dramatis selama periode pasca-1999 dan mereka menikmati periode masa keemasan hubungan selama era AKP. Turki mempresentasikan diri sebagai mitra sejajar yang tertarik untuk berkontribusi pada integrasi Suriah ke tatanan global melalui serangkaian pertukaran ekonomi dan budaya, sebuah pendekatan yang jelas didasarkan pada tantangan rezim Assad yang ada. Hubungan dengan Suriah melambangkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Turki “baru”, dimana terdapat kombinasi interdependensi ekonomi dan afinitas budaya tanpa agenda eksplisit untuk promosi demokrasi.

Pendekatan Turki ini diuji ketika *Arab Spring* menyebar ke Suriah dan mulai mengancam rezim. Kebijakan luar negeri Turki yang baru dengan jelas menginjak jalur berbahaya dalam kasus Suriah. Tak terelakkan, Turki mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati terhadap perubahan rezim di Suriah, dimana rezim Assad dihadapkan dengan oposisi yang serius. Hubungan antara kedua negara menjadi sangat tegang ketika menjadi jelas bahwa Turki juga mendukung kelompok-kelompok oposisi di belakangnya, sementara kebijakan resmi Turki terus mendukung perubahan politik melalui rezim yang ada. Hubungan dengan Suriah telah memburuk secara serius. Dalam jangka panjang, jika rezim yang ada runtuh dan digantikan oleh kekuatan pro-demokratisasi, hubungan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 52

Turki dengan Suriah dapat direvitalisasi. Namun, jika rezim yang ada berhasil mempertahankan kekuasaan dan menolak perubahan, ini akan menjadi pukulan serius dalam hubungan ekonomi, diplomatik dan budaya yang telah berkembang sedemikian pesat selama dekade terakhir.¹¹

Berikut adalah tabel perbandingan inisiatif kebijakan luar negeri Turki di Mesir, Libya dan Suriah dalam era *Arab Spring*:

Tabel 4.2: Perbandingan Inisiatif Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Mesir, Libya dan Suriah di Era Arab Spring			
Sumber: Insight Turkey, Vol. 14, No. 3 Diolah oleh: Marilda Azka Azzahra			
	Mesir	Libya	Suriah
Perubahan respon	Dukungan yang konsisten untuk kekuatan-kekuatan pro-reformasi.	Agak pasif awalnya; tidak mau berkonfrontasi dengan rezim Qaddafi pada tahap awal.	Agak pasif awalnya; mendorong rezim yang ada untuk mereformasi sistem politik.
Tingkat kerjasama dengan aktor eksternal	Pendekatan satu pihak; tidak bekerjasama kuat dengan aktor eksternal.	Mitra yang enggan dalam koalisi internasional; dukungan sedikit untuk intervensi NATO; agak pasif dengan Perancis dan Inggris yang memimpin operasi.	Mendukung kelompok-kelompok oposisi yang mengarah ke inkoherenensi; pendekatan sepihak; UE mengkritik Turki karena gagal mengambil sikap yang lebih keras.
Keinginan untuk	Pengaruh	Pengaruh	Pengaruh

¹¹ *Ibid.* hlm. 52 – 55

memainkan peran kepemimpinan	secara tidak langsung.	secara tidak langsung.	langsung dengan hasil yang tidak terduga
Cara mempengaruhi	Menekankan nilai-nilai "sekularisme"; perlu menghormati hasil pemilu; memilih terlibat daripada bertentangan dengan Ikhwanul Muslimin.	Mendukung proses reformasi di pasca Era Qaddafi; bukan peserta aktif dalam proses pembangunan rezim.	Pengakuan bahwa tekanan untuk reformasi melalui rezim Assad akan berhasil; konfrontasi sikap terhadap rezim dan catatan hak asasi manusia; pelaksanaan sanksi selama tahap terakhir

Amerika Serikat memiliki harapan besar bahwa Turki akan menjadi pemimpin regional dan mitra penting di Timur Tengah. Washington percaya bahwa orientasi Islam AKP, dikombinasikan dengan proses demokratisasi dan kinerja ekonomi yang kuat, dapat menjadikan Turki sebagai "model" bagi negara-negara di dunia Arab. Banyak analis Barat berharap bahwa Turki dapat menggunakan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah setelah *Arab Spring* dan bahwa negara-negara yang dalam masa transisi dapat melihat dan terinspirasi oleh Turki dalam menyusun konstitusi, membentuk partai politik, dan merancang kebijakan ekonomi.¹²

¹² Workshop Summary Report, *Turkey: An Emerging Power in a Changing Middle East*, International Institutions and Global Governance Program, Istanbul, 18 – 19 Juni 2014, diakses dari https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Turkey_An_Emerging

2. Qatar sebagai Rekan Strategis dibanding Negara GCC Lain

Sejak tahun 2003, kerjasama Turki dan GCC merupakan titik penting dari kebijakan luar negeri Turki karena invasi AS ke Irak. Selain hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi, kerjasama ini berisi berbagai tindakan politik seperti memastikan integritas teritorial Irak, yang berisi program nuklir Iran, serta membatasi pengaruh Syiah di Suriah dan Libanon, serta mencoba untuk menemukan solusi damai untuk masalah Palestina. Namun, masalah keamanan ini bukan hanya berasal dari perang Irak tetapi juga dari latar belakang Islamis AKP, partai politik yang berperan dalam pembuatan dialog-dialog tersebut.

Di balik ketertarikan Turki dalam hubungan dengan GCC, terdapat beberapa faktor yang kemudian menyebabkan keretakan hubungan Turki-GCC. Keretakan pertama antara Turki dan GCC muncul di seputar isu program nuklir Iran. Turki selalu mendukung negosiasi dan bahkan memulai pembicaraan dengan Iran mengenai kemampuan nuklirnya. Namun, GCC—di bawah kepemimpinan Arab Saudi—tetap enggan dan curiga tentang kesepakatan seperti itu karena alasan historis. Setelah itu, minat Turki yang meningkat dalam dinamika kawasan Timur Tengah terus memperburuk hubungan Turki-GCC.¹³

Berbagai peristiwa seperti kegelisahan GCC mengenai pelanggaran kedaulatan Irak oleh Turki melalui kesepakatan perdagangan Pemerintah Turki

[Power in a Changing Middle East Meeting Note 8-7-14.pdf](#) pada 1 Maret 2018

¹³ Nur Çetinoğlu Harunoğlu, *Turkey's Intensifying Partnership with Qatar and Its Implications for Turkish-American Relations*, Middle East Review of International Affairs, Vol. 20, No. 3, 2016, hlm. 2

– Kurdistan (KRG), sikap asertif baru Turki *vis-à-vis* Israel, Insiden Marmara flotilla pada tahun 2010, menimbulkan lebih banyak tanda tanya di sekitar Teluk tentang niat Turki di wilayah tersebut. Tetapi tidak dipungkiri bahwa popularitas Turki meningkat di mata bangsa-bangsa di negara-negara Teluk.¹⁴ Keretakan Turki dan GCC juga semakin luas ketika *Arab Spring*, ketika para pemimpin AKP menunjukkan minat dan preferensi yang kongkrit bagi Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah faksi yang dapat menggantikan rezim yang ada di wilayah tersebut. Ketidaksepakatan yang jelas antara Turki dan GCC juga muncul selama kudeta di Mesir pada tahun 2013, ketika Turki mengecam keras kudeta, sementara GCC lebih memilih mendukung kudeta dan segera mengakui kepemimpinan baru yang menggulingkan Mohamed Morsi—yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin.¹⁵

Hubungan Turki-GCC yang dimulai pada tahun 2003 telah mengalami pukulan dan mengerucut menjadi kemitraan Turki-Qatar selama *Arab Spring*. Hal tersebut yang memicu perpecahan internal dan persaingan di dalam GCC. Tetapi, bahkan sebelum pecahnya pemberontakan, Qatar—sebagai salah satu anggota GCC—sudah mulai menyimpang dari anggota GCC yang lain. Menurut ilmuwan politik yang berbasis di Qatar, Mehran Kamrava, Qatar mengadopsi diplomasi "hiperaktif". Misalnya, berbeda dari Arab Saudi, Qatar mengambil sikap seperti mengikuti pendekatan mitigasi terhadap Iran, menahan diri untuk mengkritik pengaruh Syiah dan menekankan bahwa Qatar sangat ingin

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 3

mengembangkan hubungan diplomatik yang kuat dengan Iran.¹⁶

Contoh yang paling luar biasa dari penyimpangan dari posisi GCC terungkap ketika Qatar dikenal sebagai "juara *Arab Spring* yang paling vokal" sejak awal pemberontakan Arab.¹⁷ Akibatnya, Doha berbeda dari negara GCC yang lain dengan mendukung kuat pemberontakan Arab dan kekuatan politik Islam yang mungkin menggantikan rezim yang ada. Secara khusus, dukungan Qatar pada pasukan anti-Gaddafi di Libya dan kekuatan Mohamed Morsi di Mesir menciptakan kesan Qatar sebagai pihak yang vokal memberontak melawan otoritarianisme. Perpecahan antara Qatar dan GCC menjadi sangat meluas pada Maret 2014, ketika tiga anggota GCC, Arab Saudi, UEA dan Bahrain menarik duta besar mereka dari Doha dan menuduh Qatar terlibat dalam urusan internal mereka dan membahayakan keamanan kawasan. Alasannya adalah karena Qatar mempertahankan ikatan yang kuat dengan Ikhwanul Muslimin.¹⁸ Meskipun ketegangan berkurang dalam bulan-bulan berikutnya dengan kembalinya duta-duta bangsa-bangsa ini ke Doha, krisis itu merupakan kondisi kritis dari persetujuan yang mendalam antara Qatar dan GCC.

¹⁶ Will Fulton dan Ariel Farrar-Wellman, *Qatar-Iran Foreign Relations*, American Enterprise Institute Iran Tracker, 22 Juli 2011, diakses dari <http://www.irantracker.org/foreign-relations/qatar-iran-foreignrelations> pada 1 Maret 2018

¹⁷ Larbi Sadiki, *The impact of the Arab Spring on the Gulf Cooperation Council*, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol.17, No.3, 2015, hlm. 312

¹⁸ Philip Walter Wellman, *3 Gulf states withdraw ambassadors from Qatar*, VoA News, 4 Maret 2014, diakses dari <http://www.voanews.com/content/saudi-arabia-bahrain-uae-withdraw-ambassadors-fromqatar/1864426.html> pada 1 Maret 2018

Melalui peristiwa diplomatik tersebut, Qatar mulai memberi isyarat bahwa negaranya memiliki kebijakan luar negerinya sendiri yang independen dan mampu memposisikan dirinya sendiri dalam menghadapi kerusuhan politik dan sosial yang melanda Timur Tengah. Dalam hal ini, Turki dan Qatar telah menjalankan kebijakan yang sama selama pecahnya *Arab Spring*, dengan asumsi keduanya memiliki peran utama masing-masing untuk mempengaruhi kawasan dalam rangka menciptakan perubahan.¹⁹

Meskipun memiliki latar belakang hubungan yang luas, yang banyak memfasilitasi aliansi yang lebih besar antara Turki dan Qatar adalah perang saudara Suriah. Meskipun Turki dan GCC setuju pada prinsipnya untuk menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengakhiri pertumpahan darah dan menghasilkan proses transisi politik di Suriah—sebagaimana disebutkan dalam pernyataan bersama Turki dan Pertemuan Tingkat Menteri GCC pada 2012—kebijakan luar negeri Turki sebagian besar selaras dengan kebijakan luar negeri Qatar atas proses ini.²⁰ Turki memiliki pendekatan yang berbeda dengan GCC mengenai konflik Suriah. GCC lebih memilih untuk tetap sejalan dengan AS dan menjadikan perjuangan melawan IS sebagai prioritasnya. Begitu perbedaan antara prioritas Turki dan GCC mulai terlihat, Doha muncul sebagai mitra potensial untuk Ankara. Karena keengganan Barat untuk campur tangan di

¹⁹ Op.cit. Nur Çetinoğlu Harunoğlu, hlm. 3

²⁰ Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Joint Statement on Turkey-GCC High Level Strategic Dialogue 4th Joint Ministerial Meeting, 28 January 2012, Istanbul – Turkey*, diakses dari http://www.mfa.gov.tr/joint-statement-turkey-gcc-high-level-strategic-dialogue-4th-joint-ministerial-meeting_-28january-2012_-istanbul_-turkey.en.mfa pada 1 Maret 2018

Suriyah, dan dukungan Rusia terhadap rezim Assad, para pemimpin AKP berusaha untuk mengkompensasi ketidakpercayaan dan kekecewaan mereka dengan bekerjasama dengan Qatar.²¹

²¹ *Op.cit.* Nur Çetinoğlu Harunoğlu, hlm. 4